



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan Pontianak Timur yang selanjutnya disebut Kecamatan Pontianak Timur adalah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2024-2026 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pontianak Timur yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kedudukan renstra perangkat daerah; dan
- b. pengendalian dan evaluasi.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII: PENUTUP.

- (2) Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2024-2026 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

- (1) Terhadap adanya perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Wali Kota.
- (2) Apabila RPJMD Tahun 2020-2024 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2023

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


MULADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 32



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 - 2026

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK



KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Jalan H. Rasuna Said Perumnas III Kelurahan Tanjung Hulu

Website : <https://kecptktimur.pontianak.go.id/>

Email : kecpontianaktimur@gmail.com

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-5

1.4 Sistematika Penulisan I-5

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN II-1

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur..... II-1

2.2 Sumber Daya II-6

2.3 Kinerja Pelayanan II-13

2.4 Kelompok Sasaran Layanan II-19

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS III-1

3.1 Permasalahan Pelayanan..... III-1

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis III-2

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran..... IV-1

4.2 Cascading Kinerja..... IV-2

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

5.1 Strategi V-1

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN VI-1**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maksud penyusunan Renstra adalah untuk memberikan tujuan, sasaran, strategi serta program prioritas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan, baik berupa data, informasi maupun saran-saran yang dapat membantu keberhasilan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026. dengan harapan di masa mendatang Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur untuk menjawab tantangan masa depan.

Dokumen Renstra Kecamatan Pontianak Timur disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak 2024-2026.

Semoga berguna dan bermanfaat adanya.

Pontianak, Maret 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2022.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Sinkronisasi dan penyelarasan kinerja antara perencanaan pembangunan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak serta penganggaran.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk tiga tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2024-2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.
- 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Kecamatan Pontianak Timur berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

Camat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. Perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;
- e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat).

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;

- c. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- d. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- f. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi, sebagai berikut

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;

- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan teknis terhadap fungsional tertentu bidang keuangan, pelaporan perangkat daerah, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang Pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang Pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas seksi pemerintahan meliputi fasilitasi pembinaan politik dalam negeri, fasilitasi kegiatan ormas yang berkaitan dengan ideologi dan kesatuan bangsa, administrasi kependudukan, fasilitasi administrasi fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset pemerintah daerah di kecamatan, fasilitasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul yang tidak memenuhi peraturan di bidang pertanahan di kecamatan, fasilitasi koordinasi instansi vertikal, pembinaan kelurahan serta fasilitasi pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas seksi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi partisipasi masyarakat, fasilitasi pembinaan umat beragama, fasilitasi pembinaan generasi muda, lansia dan olahraga, fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan, fasilitasi kesehatan lingkungan.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat;

Ruang lingkup tugas seksi ketentraman dan ketertiban meliputi fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi penegakan peraturan daerah, fasilitasi dan pengawasan pedagang informal, koordinasi dan fasilitasi

penanggulangan bencana, fasilitasi kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan, dan fasilitasi pengamanan aset daerah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

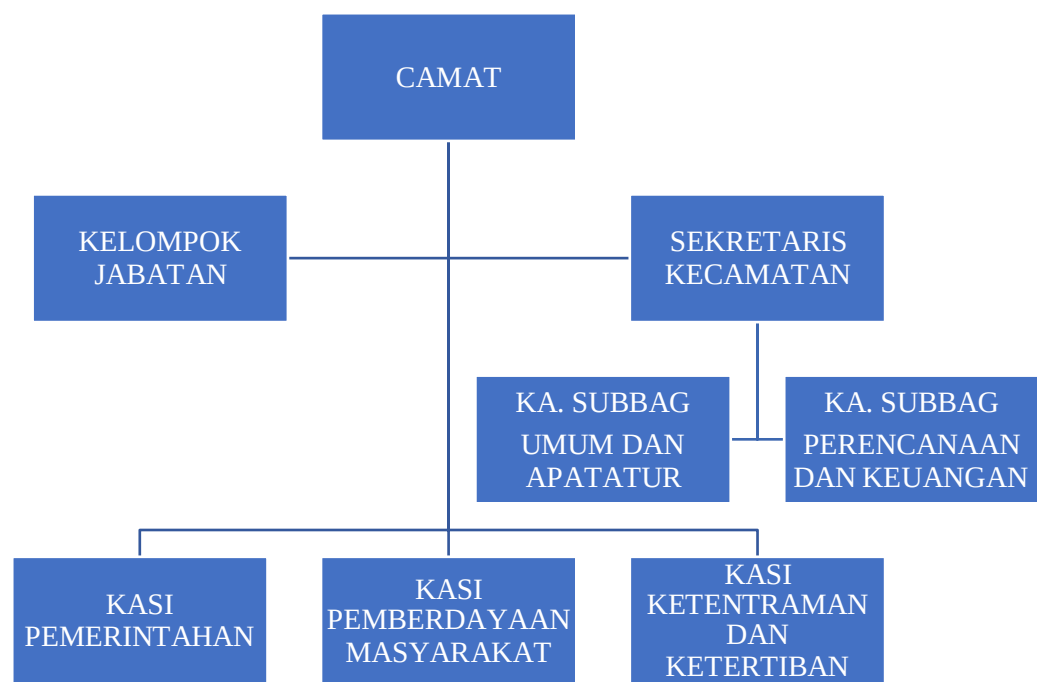
Jabatan fungsional tertentu dilingkungan Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta formasi jabatan fungsional tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016, adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
3. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
4. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
5. Kepala Seksi Pemerintahan;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



2.2. Sumber Daya

Sampai akhir Tahun 2022 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi didukung oleh 63 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

a. Dari segi Kepangkatan / Golongan Ruang, terdiri dari:

No.	Golongan	Jumlah
1.	I	0
2.	II	14
3.	III	48
4.	IV	1
Total Jumlah		63

b. Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari:

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	0
2.	SLTP	1
3.	SLTA	27
4.	D3	7
5.	S1	26
6.	S2	2
Total Jumlah		63

c. Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Diklatpim	Jumlah
1.	Diklat Pim III	1
2.	Diklat Pim IV	19
Total Jumlah		20

d. Dari Segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	32
Total Jumlah		34

Tabel 2.2.1
Perkembangan Pegawai Kecamatan Pontianak Timur
Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tahun 2020	66 orang	Kecamatan Pontianak Timur
2.	Tahun 2021	64 orang	Kecamatan Pontianak Timur
3.	Tahun 2022	63 orang	Kecamatan Pontianak Timur
4.	Tahun 2023	63 orang	Kecamatan Pontianak Timur

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pontianak Timur, maka dilengkapi sarana dan prasarana. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

a. **Gedung kantor Kecamatan Pontianak Timur terdiri dari Kantor Camat dan 7 kantor lurah, sebagai berikut:**

- 1) Kantor Camat Pontianak Timur telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan H. Rasuna Said Komplek Perumnas III Kelurahan Tanjung Hulu.
- 2) Kantor Lurah Saigon telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya 2 Kelurahan Saigon.
- 3) Kantor Lurah Tanjung Hulu telah menempati gedung Kantor sendiri yang terletak di Jalan Samanhudi gang Agatis Komplek Perumnas III Kelurahan Tanjung Hulu.
- 4) Kantor Lurah Tanjung Hilir telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Paralel Tol Kelurahan Tanjung Hilir.

- 5) Kantor Lurah Dalam Bugis telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya 1 Kelurahan Dalam Bugis.
- 6) Kantor Lurah Parit Mayor telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya 2 Kelurahan Parit Mayor.
- 7) Kelurahan Banjar Serasan telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan.
- 8) Kelurahan Tambelan Sampit telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya I Gang Pemda Kelurahan Tambelan Sampit.

b. Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor Lainnya

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagai berikut:

Daftar Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

No.	Sarana/Prasana	Kecamatan	Kelurahan Saigon	Kelurahan Tanjung Hulu	Kelurahan Tanjung Hilir	Kelurahan Dalam Bugis	Kelurahan Parit Mayor	Kelurahan Banjar Serasan	Kelurahan Tambelan Sampit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2	Gedung Serba Guna	1 Unit				-		1 Unit	-
3	Ruang Kerja Camat/Lurah/Rapat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Uniot	1 Unit	1 Unit
4	Ruang Kerja Sekretaris	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit
5	Ruang Kerja Seksi Pemerintahan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit
6	Ruang Kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1 Unit							
7	Ruang Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
8	Ruang Kerja Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
9	Ruang Kerja Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
10	Ruang Arsip	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
11	Ruang Laktasi	1 Unit	1 Unit	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit
12	Dapur	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
13	Toilet	3 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit
14	Tempat Parkir Kendaraan Pegawai	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Daftar Aset Kecamatan Pontianak Timur
Tahun 2022

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1	2	3	4	5
1	1.3.1		TANAH	9
		1	TANAH	9
		01.01	TANAH PERSIL	9
		01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	9
		01.01.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9
2	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	1145
		1	ALAT BESAR	12
		01.03	ALAT BANTU	12
		01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	9
		01.03.04.02	Portable Generating Set	5
		01.03.04.05	Dst..	4
		01.03.05	POMPA	3
		01.03.05.02	Portable Water Pump	2
		01.03.05.10	Pompa Air	1
		2	ALAT ANGKUTAN	19
		02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	18
		02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	1
		02.01.01.01	Sedan	1
		02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	9
		02.01.04.01	Sepeda Motor	9
		02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	7
		02.01.05.04	Dst..	7
		02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	1
		02.01.06.02	Mobil Jenazah	1
		02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	1
		02.03.02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	1
		02.03.02.07	Long Boat	1
		5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	836
		05.01	ALAT KANTOR	144
		05.01.01	MESIN KETIK	4
		05.01.01.02	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	4

		05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	9
		05.01.02.10	Mesin Absen (Time Recorder)	9
		05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	98
		05.01.04.01	Lemari Besi/Metal	27
		05.01.04.02	Lemari Kayu	1
		05.01.04.03	Rak Besi	20
		05.01.04.04	Rak Kayu	5
		05.01.04.05	Filing Cabinet Besi	20
		05.01.04.07	Brandkas	9
		05.01.04.15	Locker	11
		05.01.04.27	Lemari Kaca	3
		05.01.04.28	Lemari Makan	2
		05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	33
		05.01.05.02	CCTV - Camera Control Television System	1
		05.01.05.03	Papan Visual/Papan Nama	2
		05.01.05.05	White Board	1
		05.01.05.09	Peta	2
		05.01.05.10	Alat Penghancur Kertas	1
		05.01.05.76	Papan Nama Instansi	6
		05.01.05.77	Papan Pengumuman	15
		05.01.05.78	Papan Tulis	4
		05.01.05.88	Dst....	1
		05.02	ALAT RUMAH TANGGA	490
		05.02.01	MEUBELAIR	191
		05.02.01.01	Meja Kerja Besi/Metal	1
		05.02.01.02	Meja Kerja Kayu	9
		05.02.01.03	Kursi Besi/Metal	17
		05.02.01.08	Meja Rapat	6
		05.02.01.09	Tempat Tidur Besi	2
		05.02.01.24	Meja 1/2 Biro	1
		05.02.01.30	Kursi Rapat	100
		05.02.01.31	Kursi Tamu	9
		05.02.01.32	Kursi Putar	4
		05.02.01.39	Meja Komputer	7
		05.02.01.48	Sofa	5
		05.02.01.50	Dst....	30
		05.02.03	ALAT PEMBERSIH	23
		05.02.03.03	Mesin Pemotong Rumput	20
		05.02.03.04	Mesin Cuci	1
		05.02.03.07	Dst....	2
		05.02.04	ALAT PENDINGIN	111
		05.02.04.01	Lemari Es	8
		05.02.04.03	A.C. Window	48
		05.02.04.06	Kipas Angin	55
		05.02.05	ALAT DAPUR	11
		05.02.05.02	Kompas Gas (Alat Dapur)	3
		05.02.05.05	Rice Cooker (Alat Dapur)	2
		05.02.05.09	Tabung Gas	4

		05.02.05.15	Rak Piring Alumunium	2
		05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	152
		05.02.06.01	Radio	1
		05.02.06.02	Televisi	17
		05.02.06.03	Video Cassette	1
		05.02.06.05	Amplifier	3
		05.02.06.06	Equalizer	1
		05.02.06.07	Loudspeaker	2
		05.02.06.08	Sound System	17
		05.02.06.09	Compact Disc	4
		05.02.06.12	Wireless	1
		05.02.06.18	Unit Power Supply	1
		05.02.06.20	Stabilisator	8
		05.02.06.21	Camera Video	2
		05.02.06.23	Tustel	13
		05.02.06.36	Tangga Aluminium	5
		05.02.06.38	Dispenser	5
		05.02.06.39	Mimbar/Podium	2
		05.02.06.48	Handy Cam	1
		05.02.06.57	Karpet	12
		05.02.06.59	Gordyin/Kray	29
		05.02.06.75	Tangki Air	3
		05.02.06.77	Dst....	24
		05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	2
		05.02.07.01	Alat Pemadam/Portable	2
		05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	202
		05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	102
		05.03.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18
		05.03.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	84
		05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	2
		05.03.02.11	Meja Tamu Biasa	2
		05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	86
		05.03.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
		05.03.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	22
		05.03.03.07	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1
		05.03.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	62
		05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	2
		05.03.05.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
		05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	7
		05.03.06.05	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1
		05.03.06.13	Dst....	6
		05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	3

		05.03.07.04	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3
		6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	30
		06.01	ALAT STUDIO	27
		06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	26
		06.01.01.07	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	1
		06.01.01.36	Microphone/Wireless MIC	6
		06.01.01.96	Dst....	19
		06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	1
		06.01.02.15	Video Mixer	1
		06.01.02.154	Kamera Stile	1
		06.02	ALAT KOMUNIKASI	3
		06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	3
		06.02.01.03	Pesawat Telephone	3
		10	KOMPUTER	246
		10.01	KOMPUTER UNIT	106
		10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	106
		10.01.02.01	P.C Unit	76
		10.01.02.02	Lap Top	22
		10.01.02.03	Note Book	8
		10.02	PERALATAN KOMPUTER	140
		10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	7
		10.02.02.17	Dst....	7
		10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	125
		10.02.03.02	Monitor	5
		10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	75
		10.02.03.18	Dst..	45
		10.02.04	PERALATAN JARINGAN	8
		10.02.04.33	Dst....	8
		19	PERALATAN OLAH RAGA	2
		19.01	PERALATAN OLAH RAGA	2
		19.01.02	PERALATAN PERMAINAN	2
		19.01.02.18	Dst..	2
3	1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	14
		1	BANGUNAN GEDUNG	14
		01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	13
		01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	9
		01.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8
		01.01.01.05	Dst..	1
		01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	4
		01.01.09.01	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	4

		01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1
		01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	1
		01.02.02.10	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	1
4	1.3.4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0
5	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	7248
		1	BAHAN PERPUSTAKAAN	7248
		01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	7248
		01.01.01	BUKU UMUM	7248
		01.01.01.06	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	1000
		01.01.01.12	Dst....	6248
6	1.3.6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
			TOTAL	8416

2.3. Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja menurut indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pada renstra sebelumnya (periode 2015-2019) adalah sebagai berikut:

2.3.1 Kinerja Pelayanan di bidang Pemerintahan

Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Timur mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 94 Tahun 2016, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan di kelurahan.

2.3.2 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM dilaksanakan pada semester setiap tahunnya, dengan cara menyebarkan kuesioner SKM sebagai tolok ukur penilaian terhadap pelayanan Kecamatan.

Adapun tujuan utama dalam pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan. Melalui pengukuran SKM berkala akan diperoleh peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat SKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Kecamatan Pontianak Timur. Kegiatan ini diarahkan untuk mengukur peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima dan dilakukan melalui pengukuran survey kepuasan masyarakat Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terhadap 9 unsur pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan se-

Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan cara menyebarkan kuesioner SKM kepada masyarakat penerima layanan.

Tabel II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Tahun Anggaran 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I.	Indeks Infrastruktur Pemukiman terdiri dari Indeks Jalan Lingkungan dan Indeks Drainase	-	-	-	70%	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
II.	Persentase Layanan Administrasi Kecamatan Yang Telah sesuai SOP dan Tepat Waktu	-	-	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
III.	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kemasyarakatan	-	-	-	80%	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
IV.	Persentase Lembaga dan Kelompok Masyarakat Yang Aktif	-	-	-	70%	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
V.	Persentase Rekomendasi Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti Instansi/Satker Terkait	-	-	-	70%	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun Anggaran 2021 -2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I.	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	-	80%	82%	-	-	-	100%	100%	-	-
I.1	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	-	80%	82%	-	-	-	100%	100%	-	-
II	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	-	-	-	-	75%	80%	82%	85%	-	75%	80%	-	-	-	100%	100%	-	-
II.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	-	-	-	-	75%	80%	82%	85%	-	75%	80%	-	-	-	100%	100%	-	-
III	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	-	80%	82%	-	-	-	100%	100%	-	-
III.1	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	-	80%	82%	-	-	-	100%	100%	-	-
IV	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	-	80%	82%	-	-	-	100%	100%	-	-
IV.1	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	-	80%	82%	-	-	-	100%	100%	-	-

Tabel II.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	2.467.500.000.	-	-	-	-	2.466.304.888	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	370.295.500	-	-	-	-	349.925.400	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-	-
3.	Program Pembinaan Lembaga Masyarakat	173.710.000	-	-	-	-	170.444.600	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	-
4.	Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	140.362.300	-	-	-	-	139.602.100	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
5.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	579.659.900	-	-	-	-	538.929.200	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-	-
6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.424.145.414	-	-	-	-	11.378.522.741	-	-	-	-	0,92	-	-	-	-	-	-
7.	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	601.218.700	-	-	-	-	576.324.940	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-
8.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem	20.327.100	-	-	-	-	20.316.200	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
9.	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	46.270.000	-	-	-	-	46.270.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
10.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	4.540.000	-	-	-	-	4.535.500	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
11.	Program Peningkatan Pelayanan Prima	11.050.000	-	-	-	-	10.858.900	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	-
12.	Program Pengembangan Data/Informasi	24.410.000	-	-	-	-	23.676.900	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Tahun Anggaran 2021-2024**

No.	Uraian***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	55.083.160	93.299.900	832.290.400	-	-	50.268.160	82.999.900	-	-	-	0,91	0,89	-	-	430,72	65,11
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	472.725.500	1.210.487.700	2.938.469.346	-	-	444.130.800	1.129.414.600	-	-	-	0,94	0,93	-	-	149,41	154,30
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	-	475.814.350	221.281.000	57.300.000	-	-	402.870.474	181.759.500	-	-	-	0,85	0,82	-	-	-63,80	-54,88
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	436.466.230	684.000.650	639.324.000	-	-	416.610.000	660.220.050	-	-	-	0,95	0,97	-	-	25,09	58,47
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	10.663.020.165	10.592.047.590	10.641.365.012	-	-	10.430.973.620	10.386.256.846	-	-	-	0,98	0,98	-	-	-0,10	-0,43

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sasaran Layanan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yaitu Masyarakat, untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak khususnya, perlunya peningkatan kinerja:

- a. Bidang Pemerintahan
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- c. Bidang Ketentraman dan ketertiban

Adapun mitra perangkat daerah yang telah atau sedang memiliki kejasama dengan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, yaitu:

- 1) Tokoh Masyarakat khususnya pada Rukun Warga dan Rukun Masyarakat.
- 2) Melibatkan kader masyarakat seperti Karang Taruna, Forum Anak, Kader PKK.
- 3) Dukungan lintas sektor di Kota Pontianak
 - a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak terhadap layanan kependudukan kepada seluruh penduduk Kota Pontianak pada umumnya dan Kecamatan Pontianak Timur khususnya.
 - b) Dinas Sosial Kota Pontianak terhadap zonasi pendataan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), data penerima bantuan sosial dan layanan BPJS-PBI.
 - c) DP2KBP3A Kota Pontianak terkait pelaksanaan kampung KB dan kegiatan Forum Anak.
 - d) Dinas pendidikan terkait penyusunan database dan profil kecamatan.
 - e) KUA Kecamatan Pontianak Timur terhadap pemberian dispensasi nikah.
 - f) KPU Kota Pontianak terkait dengan kegiatan pemilu.
 - g) Polsek dan Koramil dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Pontianak Timur.

2.4.1. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak meliputi:

1. Kondisi geografis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang rawan akan bencana alam, misal air pasang/rob, angin puting beliung dan lain-lain.
2. Kondisi bangunan Kantor dan ruang pelayanan yang kurang memadai.
3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum

memenuhi harapan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

4. Masih kurangnya Koordinasi yang baik dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku.
5. Keberagaman penduduk di Kecamatan Pontianak Timur baik dari agama, etnis, dan tingkat ekonomi sehingga harus dikelola dengan baik agar tidak muncul konflik sosial.
6. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, meliputi:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, pengembangan teknologi informasi dan melakukan inovasi pelayanan.
2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
3. Sudah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2013-2033 sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
4. Adanya koordinasi yang baik dalam melaksanakan peraturan hukum dengan tepat dan benar.
5. Adanya peningkatan SDM yang baik lewat pelatihan, workshop dan pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan prima.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak diambil berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam mewujudkan layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas dan mewujudkan masyarakat yang berdaya, seperti yang tertuang pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelayanan Publik	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1. Belum optimalnya penerapan SOP dan SP 2. Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar 3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik 4. Kurangnya jumlah aparatur yang memiliki kapabilitas, kapasitas dan kompetensi.
2.	Pemberdayaan Masyarakat	Perlunya peningkatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Belum optimalnmya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan 2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat 3. Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait kelembagaan masyarakat
3.	Ketentraman dan Ketertiban	Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan 2. Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertibanlingkungan 3. Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Insprastruktur dan Lingkungan	Belum optimalnya pembangunan insprastruktur dan lingkungan	1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan perlu ditingkatkan 2. Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan 3. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat perlu ditingkatkan.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, maka isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan, perlu mereformasi kemampuan institusi dalam memehuni pelayanan publik.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan.
3. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan serta peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
4. Peningkatan Insfrastruktur jalan, drainase dan fasilitas umum di Kecamatan Pontianak Timur dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Penentuan tujuan dan sasaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Penentuan tujuan dan sasaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Tujuan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak ditentukan berdasarkan sasaran strategis Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Sasaran strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak ditentukan berdasarkan permasalahan pokok dan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Pontianak Timur Daerah Kota Pontianak dengan merujuk tujuan tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		1. Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	1. IKM Kecamatan (Didalamnya Termuat Pertanyaan tentang Layanan Trantib)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		2. Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya	1. Indeks Gotong Royong	85%	88%	90%
			2. Persentase Partisipasi Masyarakat	85%	88%	90%

4.2 Cascading Kinerja

Berdasarkan penentuan tujuan dan sasaran strategis untuk tahun 2024-2026, maka Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menyusun Cascading Kinerja sebagai berikut:

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Peanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)										Camat Pontianak Timur
	Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas	IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)										Sekretaris Kecamatan Pontianak Timur
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Pontianak Timur)	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pemerintahan
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pontianak Timur)	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintahan
									Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Saigon)	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintahan
									Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tanjung Hulu)	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintahan
									Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tanjung Hilir)	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintahan
									Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Dalam Bugis)	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintahan

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Peangggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Parit Mayor)	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintagan
									Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Banjar Serasan)	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintagan
									Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambelan Sampit)	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintagan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Pontianak Timur)	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kasi Pemerintagan
									Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keagamaan Lokal, Regional dan Nasional (Kecamatan Pontianak Timur)	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kasi Pemerintagan
									Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keagamaan Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Saigon)	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kasi Pemerintagan
									Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keagamaan Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Tanjung Hulu)	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kasi Pemerintagan
									Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keagamaan Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Tanjung Hilir)	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kasi Pemerintagan

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Peanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keagamaan Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Dalam Bugis)	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kasi Pemerintagan
									Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keagamaan Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Parit Mayor)	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kasi Pemerintagan
									Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keagamaan Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Banjar Serasan)	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kasi Pemerintagan
									Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keagamaan Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Tambelan Sampit)	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kasi Pemerintagan
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Pontianak Timur)	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kasi Trantib
	Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	Indeks Gotong Royong Persentase partisipasi masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pontianak Timur)	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Saigon)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Peanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Hulu)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Hilir)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Dalam Bugis)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Parit Mayor)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Banjar Serasan)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambelan Sampit)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Saigon)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tanjung Hulu)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tanjung Hilir)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Dalam Bugis)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Parit Mayor)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Banjar Serasan)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tambelan Sampit)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Saigon)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Hulu)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Peanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Hilir)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Dalam Bugis)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Parit Mayor)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banjar Serasan)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambelan Sampit)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Evaluasi Kelurahan (Kecamatan Pontianak Timur)	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubbag Umpar
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kasubbag Umpar
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kasubbag Umpar
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kasubbag Umpar
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Pontianak Timur)	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Umpar
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubbag Umpar
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kasubbag Umpar
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kasubbag Umpar

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Peanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kasubbag Umpar
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya barang milik daerah dengan baik	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kasubbag Umpar
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kasubbag Umpar
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Kecamatan Pontianak Timur)	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Kasubbag Umpar
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Umpar
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Umpar
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kasubbag Umpar
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kasubbag Umpar
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Saigon)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekkel
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Tanjung Hulu)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekkel
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Tanjung Hilir)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekkel
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Dalam Bugis)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekkel
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Parit Mayor)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekkel
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Banjar Serasan)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekkel
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Tambelan Sampit)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekkel

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Peanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kasubbag Umpar
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Saigon)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekkel
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Tanjung Hulu)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekkel
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Tanjung Hilir)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekkel
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Dalam Bugis)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekkel
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Parit Mayor)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekkel
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Banjar Serasan)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekkel
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Tambelan Sampit)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekkel
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kasubbag Umpar
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekkel
									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekkel
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sekkel
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kasubbag Umpar
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kasubbag Umpar
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Pontianak Timur)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kasubbag Umpar
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pontianak Timur)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kasubbag Umpar

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Peanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Saigon)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekkel
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Tanjung Hulu)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekkel
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Tanjung Hilir)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekkel
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Dalam Bugis)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekkel
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Parir Mayor)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekkel
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Banjar Serasan)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekkel
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Tambelan Sampit)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekkel
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Pontianak Timur)	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Kasubbag Umpar

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 memuat penetapan tujuan dan sasaran strategis Kota Pontianak untuk 3 (tiga) tahun kedepan. Dalam hal mempercepat pencapaian sasaran yang tertuang pada Perubahan RPD Kota Pontianak 2024-2026, maka perlunya penetapan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan setiap program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Tugas pokok dan fungsi kecamatan antara lain:

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang tertuang pada Baba IV, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kerbijakan tertuang pada tabel V.1.

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik yang Dilimpahkan di Kecamatan
		2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3. Meningkatkan Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	1. Melaksanakan Koordinasi Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan
	2. Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya	1. Meningkatkan Lembaga/Masyarakat yang Aktif	1. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan 2. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB. KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Pontianak Timur guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Rencana Program Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 – 2026 meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran Program : Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Sasaran Program : Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan :

- d. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- e. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Sasaran Program : Presentase LPM (Lembaga Kemasyarakatan) Aktif

Kegiatan:

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran Program : Terlaksananya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum

Indikator Sasaran Program : Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum

Kegiatan:

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sasaran Program : Terwujudnya Lembaga/Masyarakat Yang Aktif

Indikator Sasaran Program : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program : Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran Program : Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Adminitrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan dijabarkan dalam tabel VI.1 sebagai berikut:

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	15.954.427.000	Sangat Baik	15.856.136.000	Sangat Baik	16.019.386.000	Sangat Baik	16.019.386.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas			IKM kecamatan didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)	Sangat Baik	Sangat Baik	1.954.100.000	Sangat Baik	2.005.500.000	Sangat Baik	2.069.000.000	Sangat Baik	2.069.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	82%	90%	884.100.000	92%	890.500.000	95%	899.000.000	95%	899.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	82%	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	80.000.000	3 Laporan	85.000.000	3 Laporan	85.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	82%	100%	809.100.000	100%	810.500.000	100%	814.000.000	100%	814.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3 Laporan	800.000.000	3 Laporan	800.000.000	3 Laporan	800.000.000	3 Laporan	800.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Saigon)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	1.300.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tanjung Hulu)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	1.300.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tanjung Hilir)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	1.300.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Dalam Bugis)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	1.300.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Parit Mayor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	1.300.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Banjar Serasan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	1.300.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambelan Sampit)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	1.300.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	82%	90%	970.000.000	92%	1.005.000.000	95%	1.050.000.000	95%	1.050.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	82%	90%	970.000.000	92%	1.005.000.000	95%	1.050.000.000	95%	1.050.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	250 Orang	100.000.000	250 Orang	100.000.000	250 Orang	100.000.000	250 Orang	100.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kegagamaan Lokal, Regional dan Nasional (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1570Orang	1570Orang	450.000.000	1570Orang	450.000.000	1570Orang	460.000.000	1570Orang	460.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kegagamaan Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Saigon)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang	190 Orang	60.000.000	190 Orang	65.000.000	190 Orang	70.000.000	190 Orang	70.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Tanjung Hulu)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang	190 Orang	60.000.000	190 Orang	65.000.000	190 Orang	70.000.000	190 Orang	70.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Tanjung Hilir)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang	190 Orang	60.000.000	190 Orang	65.000.000	190 Orang	70.000.000	190 Orang	70.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Dalam Bugis)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang	190 Orang	60.000.000	190 Orang	65.000.000	190 Orang	70.000.000	190 Orang	70.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Parit Mayor)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang	190 Orang	60.000.000	190 Orang	65.000.000	190 Orang	70.000.000	190 Orang	70.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Banjar Serasan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang	190 Orang	60.000.000	190 Orang	65.000.000	190 Orang	70.000.000	190 Orang	70.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Tambelan Sampit)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	190 Orang	190 Orang	60.000.000	190 Orang	65.000.000	190 Orang	70.000.000	190 Orang	70.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	82%	90%	100.000.000	92%	110.000.000	95%	120.000.000	95%	120.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	82%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
	Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya			Indeks Gotong Royong	80	85	2.991.000.000	88	3.140.000.000	90	3.299.000.000	90	3.299.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
				Persentase partisipasi masyarakat	80	85		88		90		90			
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	80%	85%	2.991.000.000	88%	3.140.000.000	90%	3.299.000.000	90%	3.299.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	80%	100%	250.000.000	100%	270.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27 Laporan	27 Laporan	250.000.000	27 Laporan	270.000.000	27 Laporan	300.000.000	27 Laporan	300.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Peremberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	80%	85%	2.741.000.000	88%	2.870.000.000	90%	2.999.000.000	90%	2.999.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Saigon)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyaraka tan	23.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	25.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	27.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	27.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Hulu)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyaraka tan	23.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	25.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	27.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	27.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Hilir)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyaraka tan	23.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	25.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	27.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	27.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Dalam Bugis)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyaraka tan	23.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	25.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	27.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	27.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Parit Mayor)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyaraka tan	23.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	25.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	27.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	27.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Banjar Serasan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyaraka tan	23.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	25.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	27.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	27.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Tambelan Sampit)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyaraka tan	23.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	25.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	27.000.000	7 Lembaga Kemasyarak atan	27.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Saigon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tanjung Hulu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tanjung Hilir)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Dalam Bugis)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Parit Mayor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Banjar Serasan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tambelan Sampit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Saigon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	150.000.000	5 Pokmas/ Ormas	165.000.000	5 Pokmas/ Ormas	180.000.000	5 Pokmas/ Ormas	180.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Hulu)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	150.000.000	5 Pokmas/ Ormas	165.000.000	5 Pokmas/ Ormas	180.000.000	5 Pokmas/ Ormas	180.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Hilir)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	150.000.000	5 Pokmas/ Ormas	165.000.000	5 Pokmas/ Ormas	180.000.000	5 Pokmas/ Ormas	180.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Dalam Bugis)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	150.000.000	5 Pokmas/ Ormas	165.000.000	5 Pokmas/ Ormas	180.000.000	5 Pokmas/ Ormas	180.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Parit Mayor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	150.000.000	5 Pokmas/ Ormas	165.000.000	5 Pokmas/ Ormas	180.000.000	5 Pokmas/ Ormas	180.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banjar Serasan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	150.000.000	5 Pokmas/ Ormas	165.000.000	5 Pokmas/ Ormas	180.000.000	5 Pokmas/ Ormas	180.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambelan Sampit)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	150.000.000	5 Pokmas/ Ormas	165.000.000	5 Pokmas/ Ormas	180.000.000	5 Pokmas/ Ormas	180.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	95%	11.009.327.000	95%	10.710.636.000	95%	10.651.386.000	95%	10.651.386.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	27.440.000	100%	27.440.000	100%	27.440.000	100%	27.440.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	7.040.000	10 Laporan	7.040.000	10 Laporan	7.040.000	10 Laporan	7.040.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	4.400.000	1 Laporan	4.400.000	1 Laporan	4.400.000	1 Laporan	4.400.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	8.445.567.000	100%	8.063.831.000	100%	7.928.463.000	100%	7.928.463.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	63 Orang/Bulan	7.738.527.000	63 Orang/Bulan	7.336.791.000	63 Orang/Bulan	7.181.423.000	63 Orang/Bulan	7.181.423.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000	12 Dokumen	720.000.000	12 Dokumen	740.000.000	12 Dokumen	740.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.100.000	1 Laporan	1.100.000	1 Laporan	1.100.000	1 Laporan	1.100.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.940.000	12 Laporan	5.940.000	12 Laporan	5.940.000	12 Laporan	5.940.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	4.400.000	100%	4.400.000	100%	4.400.000	100%	4.400.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000	1 Dokumen	4.400.000	1 Dokumen	4.400.000	1 Dokumen	4.400.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	114.400.000	100%	134.400.000	100%	154.400.000	100%	154.400.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	84 Paket	84 Paket	110.000.000	84 Paket	130.000.000	84 Paket	150.000.000	84 Paket	150.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000	1 Dokumen	4.400.000	1 Dokumen	4.400.000	1 Dokumen	4.400.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	458.800.000	100%	508.100.000	100%	563.600.000	100%	563.600.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangn Bangunan Kantor (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	40.000.000	8 Paket	45.000.000	8 Paket	50.000.000	8 Paket	50.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	150.000.000	8 Paket	170.000.000	8 Paket	190.000.000	8 Paket	190.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	50.000.000	8 Paket	55.000.000	8 Paket	60.000.000	8 Paket	60.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	40.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Saigon)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.000.000	12 Paket	12.000.000	12 Paket	14.000.000	12 Paket	14.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Tanjung Hulu)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.000.000	12 Paket	12.000.000	12 Paket	14.000.000	12 Paket	14.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Tanjung Hilir)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.000.000	12 Paket	12.000.000	12 Paket	14.000.000	12 Paket	14.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Dalam Bugis)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.000.000	12 Paket	12.000.000	12 Paket	14.000.000	12 Paket	14.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Tanjung Hilir)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.000.000	12 Paket	12.000.000	12 Paket	14.000.000	12 Paket	14.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Banjar Serasan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.000.000	12 Paket	12.000.000	12 Paket	14.000.000	12 Paket	14.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Tambelan Sampit)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.000.000	12 Paket	12.000.000	12 Paket	14.000.000	12 Paket	14.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.000.000	12 Paket	22.000.000	12 Paket	24.000.000	12 Paket	24.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Saigon)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.500.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	7.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Tanjung Hulu)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.500.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	7.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Tanjung Hilir)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.500.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	7.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Dalam Bugis)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.500.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	7.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Parit Mayor)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.500.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	7.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Banjar Serasan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.500.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	7.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Tambelan Sampit)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.500.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	7.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	96 Dokumen	13.200.000	96 Dokumen	15.000.000	96 Dokumen	16.000.000	96 Dokumen	16.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000	1 Dokumen	6.600.000	1 Dokumen	6.600.000	1 Dokumen	6.600.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	300.000.000	100%	250.000.000	100%	232.000.000	100%	232.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	27 Unit	300.000.000	27 Unit	250.000.000	27 Unit	232.000.000	27 Unit	232.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.297.720.000	100%	1.311.465.000	100%	1.330.083.000	100%	1.330.083.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	247.720.000	12 Laporan	261.465.000	12 Laporan	280.083.000	12 Laporan	280.083.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.050.000.000	12 Laporan	1.050.000.000	12 Laporan	1.050.000.000	12 Laporan	1.050.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	361.000.000	100%	411.000.000	100%	411.000.000	100%	411.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	120.000.000	18 Unit	120.000.000	18 Unit	120.000.000	18 Unit	120.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	20.000.000	24 Unit	20.000.000	24 Unit	20.000.000	24 Unit	20.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Saigon)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Tanjung Hulu)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Tanjung Hilir)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Dalam Bugis)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Parit Mayor)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Banjar Serasan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Tambelan Sampit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	6 Unit	3.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	KECAMATAN	KOTA PONTIANAK

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam 3 (tiga) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan mengevaluasi tujuan dan sasaran dalam RPD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi dalam tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD, sesuai tabel VII.1.

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Secara umum, isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Rencana strategis mengandung sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun analis. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pontianak.

 WALIKOTA PONTIANAK,
EDI RUSDI KAMTONO

Sub Tahap Rancangan Akhir

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik														
	Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas													
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
				Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	82 %	90 %	884.100.000,00	92 %	890.500.000,00	95 %	899.000.000,00	95 %	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
				Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	82 %	100 %	75.000.000,00	100 %	80.000.000,00	100 %	85.000.000,00	100 %	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	82 %	100 %	809.100.000,00	100 %	810.500.000,00	100 %	814.000.000,00	100 %	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
				Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan trantibum	82 %	90 %	100.000.000,00	92 %	110.000.000,00	95 %	120.000.000,00	95 %	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	82 %	100 %	100.000.000,00	100 %	110.000.000,00	100 %	120.000.000,00	100 %	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
				Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	82 %	90 %	970.000.000,00	92 %	1.005.000.000,00	95 %	1.050.000.000,00	95 %	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											
				Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	82 %	90 %	970.000.000,00	92 %	1.005.000.000,00	95 %	1.050.000.000,00	95 %	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya														
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
				Persentase Lembaga /Masyarakat Yang Aktif	80 %	85 %	2.991.000.000,00	88 %	3.140.000.000,00	90 %	3.299.000.000,00	90 %	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	80 %	100 %	250.000.000,00	100 %	270.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											